



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)

UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUHARMEN
2. Jabatan : WAKIL KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
3. NHK : 211571

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.520.320.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/185 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 140 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000
4. Tanah Seluas 7.966 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI Rp. 155.320.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 510 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.100.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **547.500.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, VESPA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 45.500.000
3. MOBIL, TOYOTA TLC BJ40 Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000



4. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 633.700.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.268.868.581

F. HARTA LAINNYA Rp. 412.610.000

Sub Total Rp. 10.382.998.581

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 10.382.998.581

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.